

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Terhadap Belanja Modal
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2020)**

***The Effect Of Economic Growth, Local Government Revenue, Balance Fund,
And Budget Surplus On Capital Expenditure
(Study Of Local Government Regencies/Cities In Indonesia 2020)***

Anggrah Rezka Alifa¹, Sri Rahayu²

^{1,2}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung
aralifa@student.telkomuniversity.ac.id¹, sriahayu@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, dan meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan *website* Badan Pusat Statistik. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 218 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal

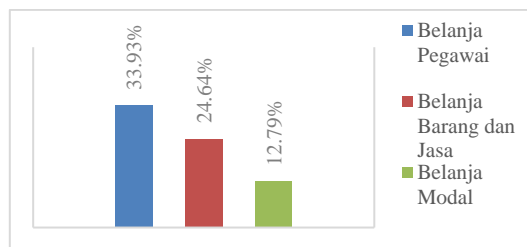
Abstract

Capital expenditures are budget expenditures for the acquisition of fixed assets and other assets that provide benefits for more than one accounting period, including expenditures for maintenance costs that maintain or increase their useful lives, and increase the capacity and quality of assets. This study aims to examine the effect of Economic Growth, Local Government Revenue, Balance Funds, and Budget Surplus on Capital Expenditures in Regency/City Governments in Indonesia in 2020, both partially and simultaneously. This study uses quantitative methods, using secondary data obtained through the website of the Directorate General of Fiscal Balance and the website of the Central Statistics Agency. The sampling technique used purposive sampling with a total sample of 218 Regency/City Governments in Indonesia in 2020. The data analysis method in this study used multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that the variables of Economic Growth, Local Government Revenue, Balance Funds, and Budget Surplus simultaneously affect Capital Expenditures. Partially, Economic Growth has no effect on Capital Expenditures, while Local Government Revenue, Balancing Funds, and Budget Surplus have an effect on Capital Expenditures.

Keywords: Economic Growth, Local Government Revenue, Balace Fund, Budget Surplus, Capital Expenditure

I. PENDAHULUAN

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud[1]. Pemerintah daerah berhak menetapkan alokasi sumber daya belanja daerah berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pengalokasian sumber daya ke dalam belanja modal merupakan proses yang penuh dengan kepentingan-kepentingan politis. Namun, karena kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan, menyebabkan belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif[2]. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari belanja daerah. Terdapat fenomena spesifik yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2020.



Gambar 1 Persentase Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan alokasi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dengan persentase sebesar 33,93%, belanja barang dan jasa sebesar 24,64%, sedangkan belanja modal hanya sebesar 12,79%. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mencapai persentase minimum belanja modal yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012, karena belanja daerah dialokasikan lebih banyak atas belanja pegawai sedangkan tingkat belanja modal cenderung rendah. Belanja modal dipengaruhi beberapa faktor, seperti pajak daerah, retribusi daerah, luas wilayah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran, pertumbuhan ekonomi dan dana otonomi khusus. Dalam penelitian ini menggunakan empat faktor yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, dikarenakan terdapat inkonsistensi pada variabel tersebut dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

II. TINJAUAN TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik yang utama adalah pemerintahan, sehingga dapat diterapkan pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik[3].

B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud[1].

Rumus untuk menghitung belanja modal:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan \& Mesin} + \text{Belanja Gedung \& Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi \& Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \quad (1)$$

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan di samping aspek pemerataan dan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu. Pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindarkan kenaikan harga dalam perhitungan, data yang digunakan adalah PDRB dengan harga konstan dan bukan dengan harga berlaku[4].
Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = ((\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}) / (\text{PDRB}_{t-1})) \times 100 \quad (2)$$

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan di samping aspek pemerataan dan stabilitas[4]. Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan pemerintah daerah karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan tersebut didapatkan dari pengadaan aset dari belanja modal[7]. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi akan memacu perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap belanja modal, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan belanja modal.

H_{a1}: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

D. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber atau beberapa indikator antara lain pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan[5].

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$\text{PAD} = \text{Hasil Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah} + \text{Lain-lain Pendapatan yang Sah} \quad (3)$$

PAD merupakan sumber penerimaan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dalam memenuhi belanja. PAD mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap belanja modal. Semakin besar PAD sebagai sumber penerimaan daerah, maka semakin baik pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja untuk menjamin pembiayaan pembangunan daerah[8]. Adanya peningkatan PAD, maka dapat meningkatkan belanja modal. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

H_{a2}: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

E. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah[5].

Rumus untuk menghitung dana perimbangan:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus} \quad (4)$$

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar untuk memberikan pelayanan yang direalisasikan dalam belanja modal. Dana perimbangan dapat menjadi pendorong penguatan pembangunan, dan menjadi andalan untuk pembiayaan rutin[9]. Sehingga dengan adanya peningkatan sumber pendanaan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, maka pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal juga akan meningkat. Dengan demikian dana perimbangan berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

H_{a3}: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

F. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

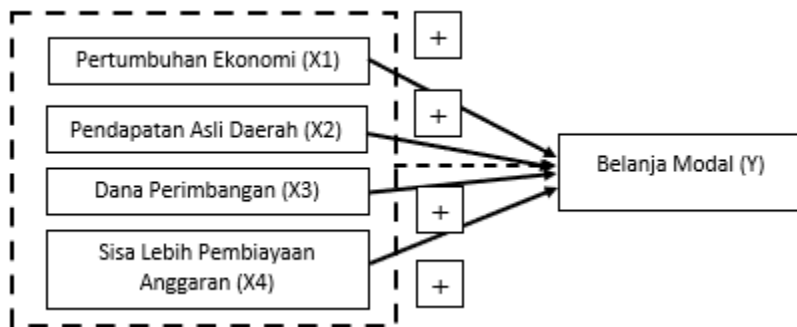
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan[6].

Rumus untuk menghitung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA):

$$SiLPA = \text{Surplus / Defisit Realisasi Anggaran} + \text{Pembiayaan Neto} \quad (5)$$

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan SiLPA tidak hanya digunakan untuk keperluan belanja operasional, namun dapat digunakan pemerintah daerah untuk belanja modal dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah dalam mewujudkan pelayanan publik [10]. Semakin tinggi SiLPA, maka semakin tinggi dana yang dapat dialokasikan untuk meningkatkan belanja modal. Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

H₄: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 218 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software SPSS* 25. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	LRA Kabupaten/Kota semester I	508
2.	Data tidak lengkap	287
3.	Data Outlier	3
Total Sampel Penelitian		218
Tahun Penelitian (2020)		1
Jumlah sampel keseluruhan dalam penelitian		218

Bentuk persamaan model regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e \quad (6)$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- a = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi dari setiap variabel independen
- X₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- X₂ = Pendapatan Asli Daerah
- X₃ = Dana Perimbangan
- X₄ = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- e = *Standard error*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif belanja modal, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Tabel 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	218	21.319	27.039	23.96777	.973203
Pertumbuhan Ekonomi	218	-10.870	28.930	-1.07362	3.550433
PAD	218	20.737	28.371	24.83068	1.261050
Dana Perimbangan	218	22.762	28.238	26.88215	.524016
SILPA	218	10.259	28.421	24.63893	2.522688
Valid N (listwise)	218				

Belanja modal memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,96777 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,973203. Nilai minimum belanja modal sebesar 21,319 (Rp.1.814.948.440) dimiliki oleh Kabupaten Pakpak Bharat, dan nilai maksimum sebesar 27,039 (Rp.553.163.090.360) dimiliki oleh Kabupaten Tangerang. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar -1,07362 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,550433. Nilai minimum pertumbuhan ekonomi sebesar -10,870% dengan PDRB sebesar Rp.12.234.000.000 dimiliki oleh Kabupaten Maros, dan nilai maksimum sebesar 28,930% dengan PDRB sebesar Rp.43.948.000.000 dimiliki oleh Kabupaten Morowali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24.83068, dengan nilai standar deviasi sebesar 1,261050. Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,737 (Rp.1.014.318.596) dimiliki oleh Kabupaten Nduga, dan nilai maksimum sebesar 28.371 (Rp.2.096.674.213.412) dimiliki oleh Kabupaten Tangerang. Dana perimbangan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,88215, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,524016. Nilai minimum dana perimbangan sebesar 22,762 (Rp.7.680.776.614) dimiliki oleh Kabupaten Sambas, dan nilai maksimum sebesar 28,238 (Rp.1.835.230.457.954) dimiliki oleh Kabupaten Tangerang. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,63893, dengan nilai standar deviasi sebesar 2,522688. Nilai minimum Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 10,259 (Rp.28,550) dimiliki oleh Kabupaten Karangasem, dan nilai maksimum sebesar 28,421 (Rp.2.202.808.511.312) dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro.

B. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.094	3.158		2.563	.011
	Pertumbuhan Ekonomi	.014	.017	.050	.804	.422
	PAD	.163	.061	.211	2.672	.008
	Dana Perimbangan	.366	.143	.197	2.561	.011
	SILPA	.082	.025	.212	3.318	.001

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 3 diperoleh persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,094 + 0,14X1 + 0,163X2 + 0,366X3 + 0,082X4 + e \quad (7)$$

Hasil dari persamaan Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Perimbangan (X3), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X4) dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 8,094 menunjukkan bahwa jika variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran bernilai nol, maka nilai Belanja Modal adalah sebesar 8,094.
- Koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,14 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar satu satuan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,14.
- Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,163 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,163.

- d. Koefisien variabel Dana Perimbangan sebesar 0,366 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Dana Perimbangan sebesar satu satuan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,366.
- e. Koefisien variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0,082 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar satu satuan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,082.

C. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.469 ^a	.220	.206
a. Predictors: (Constant), SILPA, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, PAD			
b. Dependent Variable: Belanja Modal			

Berdasarkan tabel 4 nilai koefisien determinasi dengan hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,206 atau 20,6%. Dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mampu menjelaskan Belanja Modal sebesar 20,6%, dan sisanya 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

D. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 5 Hasil Pengujian Statistik Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45.278	4	11.319	15.046	.000 ^b
	Residual	160.248	213	.752		
	Total	205.526	217			
a. Dependent Variable: Belanja Modal						
b. Predictors: (Constant), SILPA, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, PAD						

Berdasarkan tabel 3.4 diperoleh hasil pengujian simultan bahwa nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.

E. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 6 Hasil Pengujian Statistik Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,094	3,158		2,563	.011
	Pertumbuhan Ekonomi	.014	.017	.050	.804	.422
	PAD	.163	.061	.211	2,672	.008
	Dana Perimbangan	.366	.143	.197	2,561	.011
	SILPA	.082	.025	.212	3,318	.001
a. Dependent Variable: Belanja Modal						

- a. Hasil pengujian parsial Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,422 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Dalam hal ini, nilai pertumbuhan ekonomi di periode penelitian tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi bernilai negatif. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja untuk aset atau belanja modal. Hal ini sesuai dengan

- penelitian yang dilakukan oleh Febrina et al. (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
- b. Hasil pengujian parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Berpengaruhnya PAD terhadap Belanja Modal, menunjukkan bahwa daerah telah mampu mengandalkan sumber pendapatan yang dihasilkan sendiri untuk membiayai dan memberikan kontribusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan belanja modal. Sehingga dengan adanya peningkatan PAD, dapat meningkatkan Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Siswanti (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
 - c. Hasil pengujian parsial Dana Perimbangan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat untuk membiayai belanja modal, dan mampu mengalokasikan dana perimbangan dengan baik untuk belanja modal. Sehingga dengan adanya peningkatan Dana Perimbangan, dapat meningkatkan Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Saifudin dan Siswanti, 2020) yang menjelaskan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.
 - d. Hasil pengujian parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya digunakan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal seperti perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tetap lainnya. Sehingga semakin tinggi SiLPA suatu daerah, maka pengeluaran pemerintah yang salah satunya adalah pengeluaran dalam belanja modal juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Arifah, 2019) yang menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh dengan arah positif terhadap belanja modal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020. Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh dengan arah positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.

REFERENSI:

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [2] Saifudin, S., & Siswanti, E. A. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal: Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Solusi*, 18(4).
- [3] Majid, J. (2019) *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Berkah Utami
- [4] Sjafrizal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers.
- [5] Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [7] Febrina, E., Rahayu, S., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011. *E-Proceeding of Management*, 3(2), 1649–1655.

- [8] Sulistyarningsih, I., & Haryanto. (2019). Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Privinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–12.
- [9] Arifah, N. A. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Procvinsi Jawa Tengan Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–8.
- [10] Saifudin, S., & Siswanti, E. A. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal: Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Solusi*, 18(4).

